

PANGAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN

Oleh :

Eko Jokolelono

ABSTRAK

Ketersediaan pangan bersumber dari beras di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 222.073 ton, dan produksi tertinggi dihasilkan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 79.659 ton. Ada 3 Kabupaten dan 1 Kota mengalami defisit ketersediaan beras, masing-masing Kabupaten Banggai Kepulauan, Buol, Tojo Una-una, dan Kota Palu, serta 7 daerah lainnya menjadi lumbung beras. Secara keseluruhan ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Tengah mampu memenuhi 65 persen kebutuhan konsumsi beras berikutnya.

Kata Kunci : Pangan, beras, ketahanan pangan, ketersediaan, Sulawesi Tengah.

I. PENDAHULUAN

Bulan Oktober tercatat sebagai bulan pangan sedunia yang tidak boleh dilupakan oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi. Manusia mengharapkan pangan yang berlebih, tetapi sebaliknya tidak demikian, maka akan menjadi petaka bagi kehidupan manusia dan dapat meruntuhkan kedaulatan sebuah bangsa. Kondisi yang sebaliknya ini bisa digolongkan sebagai masa krisis pangan. Krisis pangan menjadi kekhawatiran bagi setiap negara termasuk negara-negara kaya.

Kekhawatiran Negara-negara kaya ini terungkap saat konferensi pers di Washington tahun 2008, yang menurut Sindunata (2008) bahwa Presiden Bank Dunia Robert Zoellick mengatakan di Bangladesh, sebuah keluarga miskin harus membayarkan separuh dari pendapatannya dalam sehari untuk membeli 2 kg beras. Kondisi ini menurutnya “kita sedang berada dalam krisis pangan dan menimbulkan kekhawatiran para petinggi negara kaya. Karena krisis pangan tersebut dapat mengancam situasi geopolitik secara global. John Walton pun mengatakan bahwa kelaparan dan krisis pangan akan melahirkan serangan terhadap globalisasi dan pasar

bebas, dua pilar utama ini menjadi penopang kemakmuran negara-negara Barat yang kaya. Bank Dunia pun memperkirakan kelaparan akan mengancam 33 negara, karena akan pecah kekerasan dan pemberontakan di sana. Pemerintahnya tidak mampu mengatasi melambungnya harga beras di negara-negara yang terkena krisis. Muhammad Yunus berpendapat “mereka (pemerintah yang mengalami krisis pangan itu) boleh saja menerangkan alasannya mengapa harga mesti melambung tapi rakyat takkan memaafkan mereka”.

Masih dari sumber yang sama, ada pendapat yang amat optimis dan percaya, keadaan krisis ini hanyalah sementara. Akan datang saatnya, pasar tidak gila dalam berspekulasi harga. Kekeringan dan gagal panen akan berlalu. Dan para spekulan tak berpeluang lagi memainkan kartu-kartu liciknya. Dengan kata lain, keadaan akan pulih kembali. Itu semua adalah omong kosong, kata mereka yang lebih realistis, walau kedengarannya pesimis. Soalnya bukan spekulasi atau kegilaan pasar, tapi karena produksi pertanian sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan pasar. Tanah-tanah pertanian makin sempit, persediaan air makin terbatas, dan perubahan iklim makin menggagalkan panen. Sesungguhnya sekarang sedang terjadi apa yang diramalkan oleh ilmuwan sosial Inggris, Thomas R.Malthus: produksi pangan tak mungkin mengimbangi lagi pertumbuhan

1) Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu.

manusia. Tuntutan manusia akan kemajuan, kesejahteraan, dan hiburan terlalu banyak dibandingkan dengan kekuatan alam dan kemampuan manusia dalam mengadakan kebutuhan pangannya. Lahan-lahan pertanian dengan mudah menjadi lapangan golf, perumahan. Kemajuan manusia menghancurkan sendiri keterbatasan untuk mengadakan pangannya. Dengan demikian, jangan harap krisis pangan ini akan pulih, jika manusia tidak mau mengubah cara dan gaya hidupnya.

Beberapa tahun belakangan ini dunia mengalami krisis pangan, yang menurut Tambunan (2008), krisis pangan kali ini menjadi krisis global terbesar abad ke-21, yang menimpa 36 negara di dunia, termasuk Indonesia. Krisis pangan global sekarang ini adalah hasil dari kesalahan kebijakan dari lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia dan IMF (Dana Moneter Internasional) dan juga kesalahan kebijakan dari banyak negara di dunia, termasuk negara-negara yang secara potensi adalah negara besar penghasil beras seperti Indonesia, India dan China. Schutter, misalnya, ketua FAO (badan PBB yang menangani pangan dan pertanian) mengatakan bahwa Bank Dunia dan IMF menyepelekan pentingnya investasi di sektor pertanian. Salah satu contohnya adalah desakan dari kedua badan dunia ini kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menghasilkan komoditas ekspor, terutama manufaktur, dengan mengabaikan ketahanan pangan.

Menurut Santosa (2008) bahwa krisis pangan global tersebut terjadi karena masing-masing negara, tidak berdaulat atas pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa atau masyarakat untuk menetapkan pangan bagi dirinya sendiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa menjadikannya subyek berbagai kekuatan pasar internasional. Ada 7 prinsip kedaulatan pangan, yaitu hak akses ke pangan, reformasi agraria, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pangan untuk pangan dan tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, dan pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Indonesia sampai saat ini masih menghadapi impor beras sebab menurut Darwanto (2005) berdasarkan data FAO 2004 empat dekade terakhir produksi beras domestik telah mampu memenuhi sekitar 97 persen dari total pasokan yang dibutuhkan setiap tahun. Sedang sisanya harus di impor, (menurut Supadi 2004) tahun 2004 sebanyak 3,25 juta ton.

Indonesia sebagai negara agraris mengalami masalah ketahanan pangan, yang menurut Yustika (2008) hal itu terkait dengan masalah pembangunan pedesaan dan sektor pertanian. Pada titik inilah dijumpai realitas bahwa kelembagaan di pedesaan setidaknya dipangku oleh tiga pilar, yaitu kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja, dan kelembagaan perkreditan. Tanah atau lahan masih merupakan aset terpenting bagi penduduk pedesaan untuk menggerakkan kegiatan produksi. Sedangkan relasi kerja akan menentukan proporsi nisbah ekonomi yang akan dibagi kepada pelaku ekonomi di pedesaan. Terakhir, aspek perkreditan pembiayaan berperan amat penting sebagai pemicu kegiatan ekonomi pedesaan. Ketiga pilar atau kelembagaan tersebut (atau perubahannya akan amat menentukan keputusan petani sehingga turut mempengaruhi derajat ketahanan pangan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa krisis pangan dunia juga dialami oleh Indonesia, karena sebagai negara agraris Indonesia tidak mampu menyediakan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, dan sisanya harus di impor dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan ketersediaan beras sebesar 3 persen pada beras impor, memperlihatkan ketahanan pangan dalam negeri tergolong rawan dan tidak cukup. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah beras ini ditentukan oleh negara lain, diantaranya dari Thailand, yang pada bulan September 2011 yang lalu dengan berbagai persoalan dalam negerinya membatasi ekspor beras. Pertanyaannya adalah apakah definisi pangan hanya terbatas atau bersumber dari beras saja? Jawabannya tentu tidak.

Selanjutnya seperti apa ketersediaan pangan yang bersumber dari komoditi beras di Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi

Tengah? Tulisan ini ingin mengetahui ketersediaan beras di Provinsi ini menurut 10 Kabupaten dan 1 Kota. Dengan sebuah harapan bahwa dari tulisan ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan yang terkait dengan perberasan di Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODOLOGI

1.1. Pendekatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari persoalan kelangkaan (*scarcity*) sumber daya. Kelangkaan sumber daya terletak pada pengelolaan dan keputusan untuk melakukan pertukaran (*tradeoff*), antara efisiensi dan pemerataan.

Efisiensi adalah kondisi dalam masyarakat di mana manfaat yang maksimal dapat diperoleh dari penggunaan seluruh sumber daya yang langka. Sedang pemerataan (*equity*) berarti manfaat dari sumber daya tersebut didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat (Mankiw, 2006).

Ketahanan pangan mulai menjadi fokus perhatian sejak *world food conference: universal declaration on the eradication of hunger and malnutrition* pada tahun 1991 hingga sekarang. Dalam perjalanan konsep ketahanan pangan ikut berubah sesuai dengan perkembangannya. Hal tersebut dapat di lihat dari perubahan definisinya, dan berikut definisi ketahanan pangan yang telah mengalami perubahan dan saling melengkapi, seperti pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lembaga dan Beberapa Definisi Ketahanan Pangan

Lembaga	Definisi
World Food Conference 1974, UN 1975	Ketahanan pangan adalah kondisi dimana manusia memiliki akses yang penuh baik secara fisik dan ekonomi dapat mencukupi nutrisi makanan dan keamanan dalam menyediakan kebutuhan pangan dalam kehidupan yang sehat sesuai dengan nilai dan budaya setempat
Life Sciences Research Office (LSRO) ¹ 1990	Ketahanan pangan adalah milik semua orang mudah mendapatkan pangan untuk hidup sehat, meliputi: tersedianya pangan yang aman dan mampu memperolehnya
Food Agriculture Organization (FAO) 1992	Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang setiap saat memiliki jumlah pangan yang cukup, aman, bergizi, bagi kehidupan yang sehat dan aktif
Food Agriculture Organization (FAO) 1996	Ketahanan pangan adalah dimana semua orang dapat mengakses setiap saat, terjangkau secara fisik dan ekonomi, cukup nutrisi, ragamnya, serta aman di konsumsi, sehat bagi kehidupan untuk beraktivitas.
Rome Declaration on World Food Security (World food Summit) 1996	Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang memiliki akses, setiap saat secara fisik dan secara ekonomi, dapat mencukupi nutrisi makanan yang aman di konsumsi untuk hidup sehat sesuai dengan nilai dan budaya setempat
World Bank 1996	Ketahanan pangan adalah bagi semua orang memiliki akses untuk setiap saat mendapatkan pangan yang cukup agar dapat aktif dan hidup sehat.
Indonesia, UU No.7/1996	Ketahanan pangan adalah kondisi dimana tersedianya pangan yang cukup bagi rumah tangga dalam jumlah dan kualitas, aman, terdistribusi dengan baik dan terjangkau secara ekonomi dan tempat
Oxfam 2001	Ketahanan pangan adalah bagi setiap orang bisa mengakses (secara ekonomi dan tempat), mengontrol atas jumlah pangan yang cukup, kualitas terjamin bagi kehidupan yang sehat.
Public Health Association of British Columbia (PHABC) ² 2004	Ketahanan pangan adalah tersedianya untuk semua orang yang diperoleh secara aman, baik secara pribadi, melalui system pangan yang berkesinambungan dan beranekaragam
Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems (FIVIMS, 2005)	Ketahanan pangan adalah bagi semua orang setiap saat memiliki akses secara fisik, social dan ekonomi untuk mendapatkan pangan yang cukup, aman dan bergizi dengan ragam pilihan untuk dapat hidup sehat.
Fisheries and Food Security: The Case of the Sultanate of Oman (Ministry of Fisheries Wealth) 2010 ³	Ketahanan pangan pada sektor perikanan adalah aktivitas sosial-ekonomi yang memiliki peran kunci dan strategis dapat dikelola secara efektif dan berkesinambungan dalam mendukung pangan baik nasional maupun regional

Sumber: Jonatan Lasa (tt) Politik Ketahanan Pangan Indonesia. <http://www.ftp.fao.org/docrep/fao/011/...pdf>. Di akses pada Mei 2010.

Keterangan:

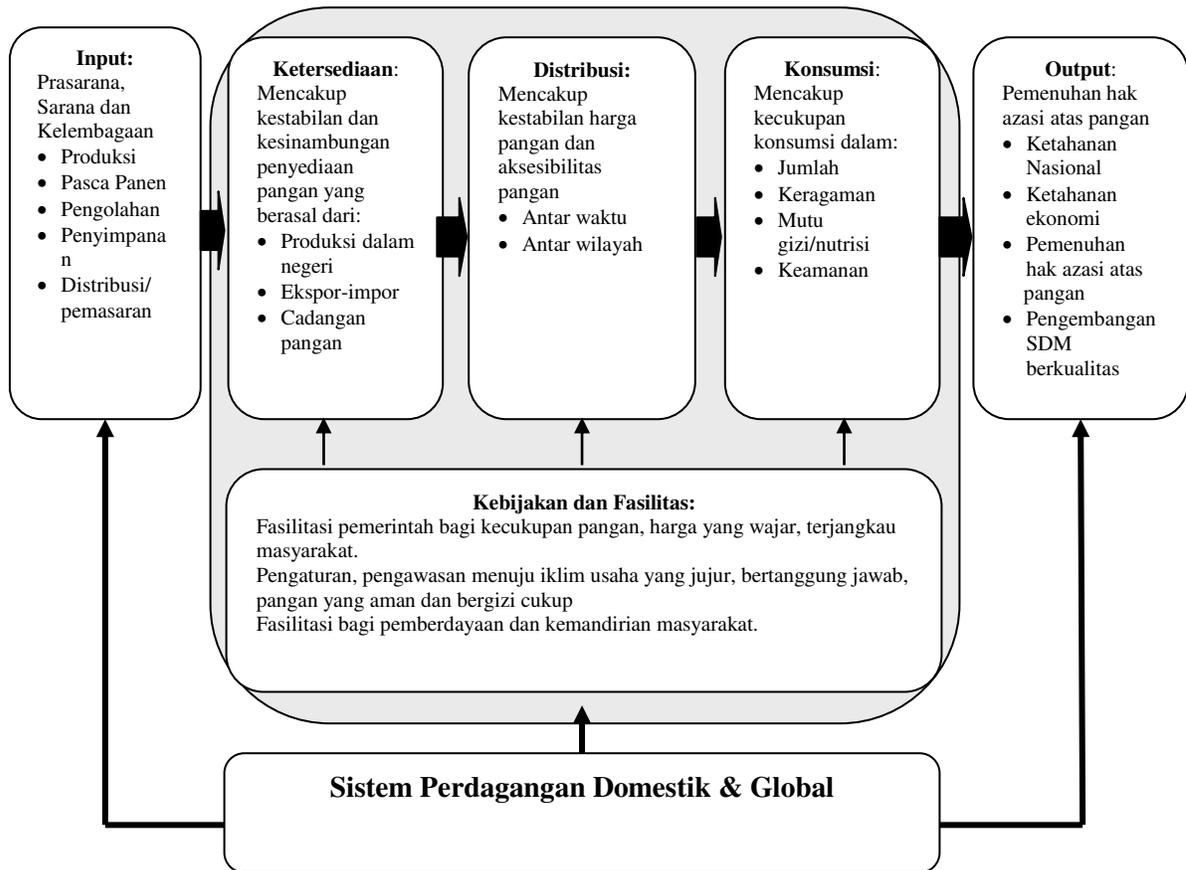
¹ Lihat Anderson (1990)

² Lihat Chapter one: Definition of Food Security, nn and ny, <http://www.fao.go> (di akses 11 April 2010)

³ Lihat Proceeding of The International Conference on Food Security in the Arab Countries: New Challenges and Opportunities in the Context of Global Price Volatility March 2-4, 2010, Sultan Qaboos University Muscat, Sultanate of Oman.

Berdasarkan definisi ketahanan pangan disebutkan di atas, setiap lembaga memberikan pengertian yang berbeda dan berubah-ubah menurut waktu, pada tingkat global, nasional, sampai kepada skala rumah tangga dan individu. Sedang ketahanan pangan menurut Suryana (2004) mencakup tiga dimensi kegiatan ekonomi yang saling terkait menyangkut ketersediaan, distribusi dan konsumsi, di tunjang oleh pelaku kepentingan (produsen, pengolah, pemasar dan konsumen), serta di kelola oleh berbagai institusi (sektoral, subsektoral, skala usaha, pemerintah dan masyarakat) dan melibatkan interaksi timbal balik antar wilayah. Berikut kerangka sistemnya.

Gambar 2.1. Kerangka Sistem Ketahanan Pangan



Sumber : Diadaptasi dari Suryana (2004)

Kerangka sistem ketahanan pangan tersebut menunjukkan “berbagai substansi yang menjadi komponen ketahanan pangan mulai dari substansi penunjang yang meliputi prasarana, sarana dan kelembagaan, kebijakan, pelayanan dan fasilitas pemerintah; subsistem ketersediaan pangan yang meliputi produksi, impor dan cadangan pangan; subsistem distribusi yang menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan; hingga subsistem konsumsi yang mendorong tercapainya keseimbangan gizi masyarakat diharapkan berperan sentral dalam memantapkan ketahanan pangan dalam situasi dan kondisi perdagangan domestik dan global, bekerja sama dengan sektor-sektor mitranya, khususnya industri dan perdagangan, prasarana fisik, serta perhubungan. Dengan memahami hal tersebut, program peningkatan ketahanan pangan ini harus memperhatikan seluruh komponen dalam sistem ketahanan pangan” (Suryana, 2004).

Ketahanan pangan menurut *world food summit* 1996 (FAO, 1996) bahwa: “*food security exists when all people, at all time, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that needs their dietary needs and food preferences for on active and healthy life*”.

Secara konsep ketahanan pangan disebutkan di atas, ada tiga hal penting yang saling terintegrasi dan terkait. Ketiganya adalah:

1. Ketersediaan (*food availability*).
2. Jangkauan atau akses (*access to sufficient food*) dan tersedia secara stabil (*stability of food stock*).
3. Pemanfaatan (*utility of food, which is related to cultural*).

Berdasarkan ketiga elemen utama ketahanan pangan di atas, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi:

1. Pangan tersedia, secara fisik terjangkau tetapi tidak secara financial atau daya belinya rendah.
2. Pangan tersedia, secara fisik tidak terjangkau dan secara financial juga tidak terjangkau, atau
3. Pangan tersedia, secara fisik tidak terjangkau, secara financial terjangkau atau daya belinya tinggi.

Terkait dengan ketiga kemungkinan tersebut, maka ketahanan pangan yang ingin ditelusuri dalam tulisan ini adalah pangan beras tersedia, secara fisik terjangkau, tetapi tidak secara financial atau daya belinya (*affordability*) rendah. Untuk kepentingan tulisan ini kajiannya terbatas pada ketersediaan saja. Ketersediaan seharusnya dimulakan dengan penelitian lapangan, sebagai prasyarat mengetahui kinerja produksi untuk mengetahui produktivitas beras di setiap daerah. Mengingat tulisan ini baru sebatas pada studi pendahuluan untuk mengetahui posisi ketersediaan saat ini, maka beberapa tahapan lainnya kita abaikan seperti aksesibilitas dan dayabeli terhadap komoditi beras di masing-masing daerah.

Komoditi beras jika diperhatikan dari asal usulnya, berasal dari sumberdaya yang disediakan oleh Tuhan dari alam dan oleh manusia sumberdaya alam ini di beri sentuhan pengetahuan dan teknologi. Kombinasi dari berbagai input menimbulkan aktivitas transformasi input menjadi output berupa beras. Meskipun dalam proses transformasi input menjadi output pada beras diyakini secara efektif telah menciptakan nilai tambah, tetapi belum tentu dilakukan secara efisien. Efisien dalam kamus bahasa Indonesia merupakan kegiatan tepat cara menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Seringkali efisiensi menjadi ukuran kinerja dari dimensi produksi, maka untuk membicarakannya perlu memahami teori produksi.

2.2 Pendekatan Teori Produksi

Secara sederhana pengertian produksi merupakan aktivitas yang di mulai dari input kemudian di proses dan menghasilkan output. Produksi tidak terbatas pada proses menghasilkan barang atau jasa akhir saja, menurut Joesron dan Fathorozi (2003) produksi merupakan serangkaian kombinasi dari beberapa input, mengolahnya, sampai menjadi barang akhir, lebih dari itu berkaitan dengan proses pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, dan sampai pada pemasaran produk. Dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk banyak hal yang dihadapi, di satu sisi berhubungan dengan hal tidak dapat dipikirkan oleh manusia seperti kerumitan sehingga menimbulkan keragu-

raguan. Pada sisi yang lain ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Kesenjangan antara proses dan keinginan tersebut peran teknologi menjadi sangat penting dilibatkan.

Menurut Roger (2005, 1995) bahwa sebuah teknologi diciptakan sebagai instrumen aksi untuk mengurangi keraguan dalam hubungan timbal balik yang rumit mendapatkan hasil. Teknologi akan menjadi lebih penting dan memberi kontribusi apabila digunakan dalam proses produksi barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia, dalam menyediakan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan sesuai dengan selera konsumen serta terjangkau secara fisik dan financial bagi setiap individu sehingga ketahanan pangan dapat di capai.

Roger juga menjelaskan dalam teori difusi inovasi, bahwa difusi merupakan suatu tahapan dalam proses perubahan teknik (*technical change*). Menurutnya difusi merupakan suatu tahapan di mana keuntungan dari suatu inovasi dapat berlaku secara umum. Karena proses tahapannya di mulai dari inovator, inovasi diteruskan melalui pengguna lain, dan akhirnya menjadi hal biasa dan di terima sebagai bagian dari kegiatan produktif.

1.2. Metode Analisis Ketersediaan Pangan Komoditi Beras

Pendekatan secara holistik konsep ketahanan pangan membicarakan ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), dan daya beli (*affordability*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Ketersediaan mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri, ekspor dikurangi impor, dan cadangan pangan (Suryana, 2004).

Berdasarkan elemen utama tersebut dapat di bangun rumus, untuk mengukur ketahanan pangan di lokasi penelitian. Konsep ketersediaan (*availability*) mencakup produksi dalam negeri, ekspor dikurangi impor, dan cadangan pangan. Konsep di maksud dalam tulisan ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Eko Jokolelono, 2011):

Availability = Produksi dalam negeri di tambah ekspor dikurangi impor di tambah cadangan pangan.

Di mana:

- Produksi dalam negeri = P_{DN}
- Ekspor = X
- Impor = M
- Cadangan pangan = Cad_{pangan}

Selanjutnya dapat di bangun rumusan persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Availability} = \Sigma \{ P_{DN} + (X - M) + Cad_{pangan} \} \quad (1)$$

Di lokasi penelitian:

- Produksi dalam negeri = P_{DN}
→ Dihasilkan dari produksi lokal ($\equiv P_{Lokal}$)
- Ekspor = X
→ Perdagangan lintas wilayah datanya sulit di peroleh
- Impor = M
→ Produksi luar masuk wilayah di anggap tidak ada

karena kesulitan data

Cadangan pangan = Cad_{pangan} → Di anggap tidak ada karena kesulitan data (meskipun di gudang beras dan di rumah tangga tersedia).

Berdasarkan identitas tersebut, maka availability dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Availability} &= \Sigma \{ P_{Lokal} + (X - 0) + 0 \} \\ &= \Sigma \{ P_{Lokal} + X \} \end{aligned} \quad (2)$$

Untuk mengetahui pangan dikatakan tersedia dan tidak tersedia lakukan langkah-langkah berikut: pertama, bandingkan antara produksi lokal dan perdagangan lintas wilayah dengan konsumsi lokal Kabupaten. Kedua, melakukan pra-survei distribusi fisik komoditi beras untuk mengetahui kebutuhan pasar lokal Kabupaten.

Cara menghitung langkah pertama, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pangan tersedia atau tidak tersedia} = \frac{\Sigma(\text{Produksi Lokal} + X)}{\text{Kebutuhan pasar lokal Kabupaten}} \quad (3)$$

Indikator	Ukuran	Interpretasi
Pangan tersedia	>1	Ketersediaan pangan di lokasi penelitian tergolong tersedia (<i>secure</i>)
Pangan tidak Tersedia	<1	Ketersediaan pangan di lokasi penelitian tergolong tidak tersedia (<i>insecure</i>)

Cara menghitung langkah kedua:

Perlu mengetahui kebutuhan fisik komoditi beras di pasar lokal Kabupaten melalui pra-survei. Kemudian ketahui pula kebutuhan fisik beras di pasar lokal Kabupaten melalui penelitian. Selanjutnya bandingkan kebutuhan fisik beras hasil penelitian dengan hasil pra-survei. Berikut rumus yang dapat digunakan:

$$Availability = \Sigma \{ P_{Lokal} + X \}$$

Produksi lokal (P_{Lokal}) dan ekspor (X) secara fisik di anggap habis terserap oleh pasar lokal Kabupaten dan pasar luar Kabupaten. Selanjutnya formulasi pangan tersedia di lokasi penelitian atau di sebuah wilayah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Kebutuhan di pasar lokal kabupaten pra-survei}}{\Sigma \text{Kebutuhan di pasar lokal kabupaten hasil penelitian}} = \text{Availability} \quad (4)$$

Di lokasi penelitian berdasarkan hasil pra-survei kebutuhan beras secara fisik di pasar lokal Kabupaten pada tahun 2008 sebesar 30 persen dari total produksi. Atas dasar hasil pra-survei tersebut, secara operasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

$$Availability = \Sigma \{ P_{Lokal} + (X - 0) + 0 \} \\ = \Sigma \{ P_{Lokal} + X \}$$

Di mana:

$$\begin{aligned} \text{Hasil pra-survei} \rightarrow P_{Lokal} &= 30\% \\ X &= 70\% \end{aligned}$$

Indikator	Ukuran	Interpretasi
Pakan tersedia	$P_{Lokal} > X = > 30$	Ketersediaan pangan di lokasi penelitian tergolong tersedia (<i>secure</i>) atau tahan
Pakan tidak Tersedia	$P_{Lokal} < X = < 30$	Ketersediaan pangan di lokasi penelitian tergolong tidak tersedia (<i>insecure</i>) atau tidak tahan

Kedua cara perhitungan disebutkan di atas untuk selanjutnya digunakan dalam penelitian untuk mengukur aspek distribusi yang di lihat dari dimensi keterjangkauan (*accessibility*).

Untuk itu dalam rangka mewujudkan keinginan tulisan ini mengetahui ketersediaan beras di masing-masing daerah kabupaten dan kota, hanya digunakan persamaan (2) saja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penggunaan persamaan (2) diperoleh hasil hitungan seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Hasil ini menunjukkan bahwa, ada 3 daerah Kabupaten dan 1 Kota yang mengalami defisit ketersediaan beras adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Buol, Tojo Una-una, dan Kota Palu. Untuk keempat daerah defisit menunjukkan produksi lokalnya tidak tersedia, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan lokalnya sehingga harus di impor dari daerah lain. Serta 7 daerah lainnya menjadi sumber ketersediaan beras atau dapat di ekspor ke daerah defisit, yang dapat menjaga stabilitas perberasan di daerah ini. Data ini juga memperlihatkan bahwa sesungguhnya Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2010 diperhatikan dari ketersediaan komoditi beras tergolong tersedia atau mampu menyediakan beras sebesar 222.073 ton (65 persen untuk kebutuhan berikutnya), dan tertinggi berasal dari produksi lokal Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 79.659 ton. Olehnya tidak ada alasan bagi Provinsi ini untuk mengimpor beras (M) atau mendapatkan atau mendatangkan beras dari tempat lain. Bahkan sebaliknya daerah ini dapat mengekspor ke daerah lain, dengan sebuah catatan daerah ini harus berani melakukan studi yang intensif terhadap ketersediaan dari aspek produksi, aksesibilitas dari aspek distribusinya, dan daya beli masyarakat dari aspek konsumsinya, sebagai upaya

Tabel 1 Ketersediaan Beras di Sulawesi Tengah 2009

No	Kabupaten/Kota	Penduduk	Produksi	Konsumsi		Defisit	Rangking	
			Beras (konversi) (ton)	Konsumsi/ kap/thn (kg/cap)	Keperluan Beras (ton)		Surplus Beras	Defisit Beras
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banggai Kepulauan	155728	1315	139,15	21670	-20355		2
2	Banggai	295555	106354	139,15	41127	65227	2	
3	Morowali	177720	35560	139,15	24730	10830	7	
4	Poso	160830	51595	139,15	22380	29215	5	
5	Donggala	249192	64415	139,15	34675	29740	4	
6	Tolitoli	198441	51270	139,15	27613	23657	6	
7	Buol	117028	16117	139,15	16284	-167		4
8	Parigi Moutong	372286	131463	139,15	51804	79659	1	
9	Tojo Una-una	180261	3910	139,15	25083	-21173		1
10	Palu	309032	36140	139,15	43002	-6862		3
11	Sigi	222300	63796	139,15	30933	32863	3	
	Privinsi	2438373	561373	139,15	339300	222073		

Sumber data : Badan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah 2010 (di olah)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketersediaan beras Provinsi Sulawesi Tengah surplus sebanyak 222.073 ton, dan mampu menyediakan komoditi beras sebesar 65 persen untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras berikutnya.

Perlindungan terhadap petani beras. Daerah ini sangat mungkin dapat menentukan tata niaga perberasan dan dapat menentukan atau menetapkan harga yang pantas bagi petani dan harga yang wajar bagi konsumennya pada masa yang akan datang.

Untuk menjaga konyuitas dan stabilitas perberasan. Berdasarkan hasil kajian daerah ini perlu melakukan berbagai terobosan dan keberpihakkan dalam melindungi petani beras dengan meningkatkan produktivitas perberasan di masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto, Dwidjono H. 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. *Ilmu Pertanian* Vol. 12 No.2, 152-164.
- Eko Jokolelono.2011. Model Penguatan Kinerja Tambak Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. (*Disertasi*) Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Food Agriculture Organization 1996. Rome Declaration and World Food Summit Plan of Action. Rome.
Available at: www.fao.org/docrep/003/x8346E/x8346e82.htm#P1_10
- Joesron dan M. Fathorozi. 2003. *Teori Ekonomi Mikro Dilengkapi Beberapa Bentuk Fungsi Produksi*. Jakarta. PT. Salemba Emban Patria.
- Jonathan Lasa. (tt). Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1952-2005. <http://www.ftp.fao.org/docrep/fao/011/...pdf> (di akses, mei 2010).
-1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit: Balai Pustaka.
- Mankiw, N Gregory. (2006). *Principles of Economics Pengantar Ekonomi Mikro*. Edisi 3. Alih bahasa: Chriswan Sungkono. Penerbit: Salemba Empat.
- Prabawa, Santoso Tri. 2002. Perilaku Konsumen Tinjauan Aspek Budaya. *Fokus Ekonomi* Vol 1, No. 1. Hal. 28-37.
- , *Proceeding of The International Conference on Food Security in The Arab Countries: New Challenges and Opportunities in The Contex of Global Price Volatility*. March 2-4, 2010 Sultan Qobus University Muscat, Sultanate of Oman.
- Roger, E.M. 1995. *Diffusion of Innovation*. (4th Edition), New York, Free Press.
- Roger, E.M. 2003. *Diffusion of Innovation*. New York, Free Press.
- Sindunata. 2008. Tanda-tanda Zaman Amarah dari Perut. Basis. Nomor 05-06, Tahun ke-57, Mei-Juni.
- Supadi. 2004. Ketahanan Pangan dan Impor Beras Berkelanjutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. *Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian*. Maret. caser@indosat.net.id. Di akses tanggal 22 nopember 2008.
- Suryana, Ahmad. 2004. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. Edisi 2003/2004. BPFE – Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2008. Ketahanan Pangan di Indonesia Inti Permasalahan dan Alternatif Solusinya. *Makalah*, untuk Kongres ISEI, Mataram.